PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Jl. A. Yani No. 16 Telp. [0286] 591043
[PABX] Telex 25644, Fax. 591187 Banjarengara 53414
http://banjarnegarakab.go.id e-mail : dinkominfo@banjarnegarakab.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 488 / 057 TAHUN 2022

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022

MENIMBANG :
a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Banjarnegara tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022.

MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pedoman penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

KEDUA : Daftar Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

KETIGA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan ini menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara,
Pada tanggal 03 Oktober 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Kabupaten
Banjarnegara

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINKOMINFO

R. RIONO RAHADI PRASETYO, S.H., M.H.,

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Pj. Bupati Banjarnegara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
3. PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Lokasi Server	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1, Jo UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik Psl 25	Tdk terbatas	- Mengungkap kepetingan hak atas kekayaan intelektual - Adanya tindak kriminal penggrusakan, pencurian data dan Penyalahgunaan hak akses	- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Melindungi data dan perangkat yang ada serta melindungi operator
2	Internet Protocol/IP Address Private	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1, Jo UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik Psl 25	Tdk terbatas	- Mengungkap kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Adanya penyalahgunaan hak akses	- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Melindungi hak akses
3	Bandwith Management	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1, Jo UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik Psl 25	Tdk terbatas	- Mengungkap kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Adanya Penyalahgunaan kapasitas bandwith diluar ketentuan	- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Mengatur kestabilan penggunaan bandwith
4	Data Frekuensi Komunikasi Mikrotik	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1, Jo UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik Psl 25	Tdk terbatas	- Mengungkap kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Adanya Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Menjaga keamanan jalur komunikasi

5	Kode Akses Elektronik	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1, Jo UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik Psl 25	Tdk terbatas	- Mengungkap kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Adanya Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Menjaga keamanan jalur komunikasi
6	Sistem Keamanan Elektronik	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1	Tdk terbatas	- Mengungkap kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Adanya Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Menjaga keamanan jalur komunikasi
7	Kunci Sistim Sandi	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf c, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1	Tdk terbatas	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
8	Berita/ Radiogram Rahasia	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf c, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1	Tdk terbatas	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
9	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf c, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1	Tdk terbatas	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
10	Identitas Aduan Masyarakat	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 a dan h, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1	Tdk terbatas	- Menghambat kepentingan proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi	- Melindungi kepentingan proses penegakan hukum - Melindungi rahasia pribadi
11	Menara Telekomunikasi	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1	Tdk terbatas	- Mengungkap kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Adanya Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Melindungi kepentingan ha katas kekayaan intelektual - Menjaga keamanan jalur komunikasi
12	Data Pribadi Penduduk	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf h, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1, Jo UU No.	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi akan mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi

		24/2013 ttg perubahan atas UU No. 23/2006 ttg Administrasi Kependudukan Pasal 58 dan 79, PP 40 tahun 2019 Pasal 54-57	penduduk bersangkutan		
13	Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja dan Berkas Pemeriksaan (kinerja dan PDTT)	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf a, h, dan I, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1, Jo UU Nomor 31/1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Tdk terbatas	- Menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi - Mengungkap memorandum/surat yang bersifat rahasia	Melindungi identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana
14	Surat pengaduan yang diterima Inspektorat	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf a, h, dan I, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1, Jo UU Nomor 31/1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Psl 31 ayat 1	Tdk terbatas	- Mengganggu proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi - Mengungkap memorandum/surat yang bersifat rahasia	Melindungi identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana
15	Disposisi/ Rekomendasi /perintah atasan untuk melakukan pemerikasaan /pembinaan	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf a, h, dan I, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1	Tdk terbatas	- Mengganggu proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi - Mengungkap memorandum/surat yang bersifat rahasia	Melindungi identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana
16	Laporan Hasil Pengawasan dan Uji Laboratorium LH tentang Baku Mutu	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17b, dan h, Jo UU Nomor 32/2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan LH, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1	Selama masih berlaku	- Mengungkap kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Menghambat Pelaksanaan Pengawasan Laboratorium LH	- Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual - Melindungi Pelaksanaan Pengawasan Laboratorium LH
17	Proses Penyelesaian Perkara yang	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf a, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut / jaksa	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi kepentingan proses penegakan hukum

	sedang ditangani oleh PPNSLH				
18	Rencana Pengawasan Usaha/ Kegiatan oleh PPLHD	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf a, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1	Sampai dengan selesainya pengawasan usaha / kegiatan	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi kepentingan proses penegakan hukum
19	Dokumen Penyelesaian Sengketa/ Konflik Lingkungan	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf a, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak yang bersengketa	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi kepentingan proses penegakan hukum
20	Data (pribadi) Penerima Bansos RTLH	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf i, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1	Sampai dengan terbitnya surat keputusan tentang penerima bansos	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi
21	Data spasial dan rincian data pertanahan milik Pemda	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf d, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1	Selama berlaku	Mengungkap kekayaan milik pemerintah	Melindungi rahasia kekayaan milik pemerintah
22	Identitas Penderita HIV/AIDS	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf h, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1, Jo UU 36/2009 ttg Kesehatan Psl 57	Terbuka apabila ada persetujuan dari yang bersangkutan	- Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi akan mengungkap rahasia pribadi penderita - Ada stigma dan pengucilan penderita oleh masyarakat	- Melindungi rahasia pribadi penderita - Menjaga stigma dan pengucilan penderita oleh masyarakat
23	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf h, Jo UU Nomor 29/2004 ttg praktik kedokteran Psl 47, Jo UU Nomor 44/2009 ttg Rumah Sakit Psl 32 huruf I, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1	Terbuka apabila ada persetujuan dari yang bersangkutan	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi akan mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien

24	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf b, dan I, Jo UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 23, Jo UU Nomor 30/2000 tentang Rahasia Dagang Psl 3 dan 4, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1, Jo UU No. 30/2014 ttg Administrasi pemerintahan, Psl 51	Selama berlaku	- Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat - Mengungkap rahasia memorandum/surat yang bersifat rahasia - Membuka rahasia dagang - Menghambat proses pengadaan barang dan jasa	- Melindungi dari persaingan usaha yang tidak sehat - Melindungi rahasia memorandum/surat yang bersifat rahasia - Melindungi rahasi dagang - Memperlancar proses pengadaan barang dan jasa
25	Data Pegawai yang akan dilantik dan atau dimutasi	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf i, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1	Sampai proses pelantikan	- Mengungkap kerahasiaan dalam memo intra dan antar badan publik - Dapat menghambat proses pelantikan/mutasi	- Melindungi kerahasiaan memo intra dan antar badan publik - Menjamin kelancaran proses pengambilan keputusan
26	Data Profil pegawai beserta keluarga	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 h	Selama menjadi ASN	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi akan mengungkap rahasia PNS	Melindungi rahasia PNS
27	Data pegawai mendapat hukuman disiplin	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 h	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari PNS bersangkutan	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi akan mengungkap rahasia PNS	Melindungi rahasia PNS
28	Data Penempatan CPNS sebelum penetapan	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 h	Sampai proses penempatan CPNS	- Mengungkap kerahasiaan dalam memo intra dan antar badan publik - Dapat menghambat proses penempatan CPNS	- Melindungi kerahasiaan memo intra dan antar badan publik - Menjamin rahasia proses penempatan PNS
29	Data Pegawai yang sedang menjalani proses perceraian	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 h	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari PNS bersangkutan	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi akan mengungkap rahasia PNS	Melindungi rahasia PNS
30	Data Hasil Medical Cek Up	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 h	Terbuka apabila mendapat	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi akan mengungkap rahasia PNS	Melindungi rahasia PNS

			persetujuan dari PNS bersangkutan		
31	Data Hasil evaluasi Penilaian pengajar dan peserta diklat	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 h	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari PNS bersangkutan	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi akan mengungkap rahasia PNS	Melindungi rahasia PNS
32	Data nilai diklatpim/Proper	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 h	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari PNS bersangkutan	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi akan mengungkap rahasia PNS	Melindungi rahasia PNS
33	Hasil Rekomendasi Kompetensi/Assesment	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 h	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari PNS bersangkutan	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi akan mengungkap rahasia PNS	Melindungi rahasia PNS
34	Hasil Penilaian SKP	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 h	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari PNS bersangkutan	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi akan mengungkap rahasia PNS	Melindungi rahasia PNS
35	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf h, Jo UU Nomor 29/2004 ttg praktik kedokteran Psl 47, Jo UU No. 36/2009 ttg Kesehatan Psl 57 ayat (1), Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1	Terbuka apabila ada persetujuan dari pasien yang bersangkutan	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi akan mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
36	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf h, Jo UU Nomor 29/2004 ttg praktik kedokteran Psl 48 dan 51c, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1	Terbuka apabila ada persetujuan dari pasien yang bersangkutan	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi akan mengungkap rahasia pribadi seorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang

	dicatat dalam rekam medis				
37	Hasil audit medik dengan sarana Kesehatan	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf h, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1	Terbuka apabila ada persetujuan dari pasien yang bersangkutan	- Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi akan mengungkap rahasia pribadi seorang - Mengungkap akuntabilitas sarana kesehatan	- Melindungi rahasia pribadi seseorang - Menjaga akuntabilitas sarana kesehatan
38	Identitas Korban, Pelaku, Pelapor, dan Saksi Kekerasan	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf i, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1, Jo UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak	Terbuka apabila ada persetujuan dari yang bersangkutan	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi akan mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi
39	Hasil Assesment Kekerasan	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf i, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1, Jo UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak	Terbuka apabila ada persetujuan dari yang bersangkutan	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi akan mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi
40	Biodata (data pribadi) Murid	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 h	Terbuka apabila ada persetujuan dari yang bersangkutan	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi akan mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi
41	Laporan Informasi Intelegen	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf c, Jo UU Nomor 17/2011 ttg Intelijen Negara pasal 25 huruf a dan g	Selama Berlaku	Mengganggu perlindungan kepentingan pertahanan dan keamanan	Melindungi kepentingan pertahanan dan keamanan
42	Data Piutang Wajib Pajak	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Psl 17 huruf h, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari wajib pajak yang bersangkutan	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi akan mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
43	Data pembinaan	UU Nomor 14/2008 ttg Keterbukaan	Terbuka apabila	Informasi yang berkaitan dengan hak	Melindungi rahasia penjual miras

	dan penjual miras	Informasi Publik Psl 17 huruf h, Jo UU Nomor 43/2009 ttg Kearsipan Psl 44 ayat 1	mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	pribadi akan mengungkap rahasia penjual miras	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA
Selaku
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KABUPATEN BANJARNEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DINKOMINFO

R. RIONO RAHADI PRASETYO, S.H.,M.H.,
Pembina Tk. I
NIP. 19640217 198607 1 001